



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010- 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 - 2018.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 – 2018.

Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2014-2018.

Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi disusun sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun mendatang, serta untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2014.

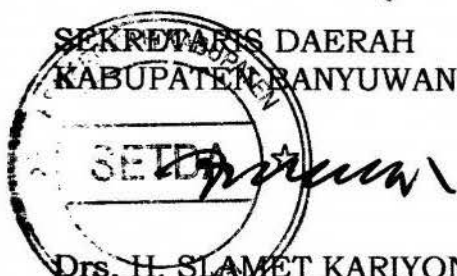
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 8 Agustus 2014



Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 24 TAHUN 2014  
TANGGAL : 8 Agustus 2014

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah / birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, melalui reformasi birokrasi praktek-praktek KKN akan berkurang dan bahkan tidak ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Kerja / Unit Kerja, serta adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2014 – 2018. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu : terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penyusunan Road Map reformasi birokrasi dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu dilakukan diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jika dilihat dari sisi sasaran dapat diuraian sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN, antara lain :
  - BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, suluruh pimpinan SKPD/Unit Kerja diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sudah diserahkan kepada KPK.
  - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terus dikembangkan;
  - Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan bagi pengelola keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
  - Dalam rangka meningkatkan komitmen yang kuat untuk menegakkan kejujuran bahwa semua PNS dan Kepala Desa menandatangani Pakta Integritas.
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat, antara lain:
  - Salah satu gebrakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah memberikan akses internet secara gratis kepada masyarakat pada beberapa spot atau taman-taman kota. Akses ini merupakan strategi Pemerintah daerah untuk memberikan hiburan, sarana komunikasi dan media pengembangan pengetahuan dan ekonomi di Kabuoaten Banyuwangi.
  - Agenda pemerataan ekonomi dan menjaga budaya ekonomi lokal ditunjukkan dengan ketatnya pemberian ijin untuk pembangunan mall-mall (pendirian Mall tidak diijinkan).
  - Penambahan dan pengembangan beberapa kawasan hijau juga menjadi keberhasilan Kabupaten ini dalam melestarikan lingkungan.
  - Pengembangan budaya lokal juga menjadi perhatian Kabupaten ini dengan aktifnya event-event budaya yang secara rutin dijadwalkan dan mendapatkan support baik financial maupun pelaksanaannya.

- Pembangunan Bandar Udara juga menjadi prioritas sebagai penunjang pengembangan ekonomi dan aktivitas penduduk Kabupaten ini.
  - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah membuka sarana pengaduan masyarakat melalui SMS Center : 082131545555 / Website : [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id).
  - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line dan gratis.
  - Telah melaksanakan kerja sama dengan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) untuk melihat tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
  - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan pelayanan One Stop Service, yaitu : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua SKPD / Unit Pelayanan Publik, dan pelayanan surat-surat keterangan yang mengetahui camat, tidak perlu ke kecamatan, namun cukup di laksanakan di kelurahan / desa dengan menggunakan IT.
  - Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan e-office, sebagai bagian dari pengembangan e-government.
- c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, antara lain:
- Dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, penganggaran dan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (e-planning, e-budgeting, e-audit) / SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) dengan alamat akses : [sikd.banyuwangikab.go.id](http://sikd.banyuwangikab.go.id). Selain itu, juga mengembangkan e-procurement.
  - Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Evaluasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran dan pelaporan).
  - Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun Penetapan Kinerja (PK)/Kontrak Kinerja, dan akan dikembangkan.
  - Nilai CC hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2012 yang dievaluasi/dinilai tahun 2013.
  - Peringkat 16 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2012 yang dinilai tahun 2013.

**Berbagai** capaian di atas menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan **reformasi** birokrasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

**Berbagai** hal-hal yang sudah dicapai tersebut akan terus dipelihara bahkan **terus** ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus **merasakan** perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

**Pelaksanaan** reformasi birokrasi harus berfokus pada kebutuhan para **pemangku** kepentingan. Dari hasil identifikasi harapan-harapan pemangku **kepentingan**, antara lain sebagai berikut :

- Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN :

- a. Pemangku kepentingan eksternal / masyarakat

- Masyarakat sangat mendambakan adanya birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi, jujur dan netral.
- Masyarakat mengharapkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya para pejabat/pimpinan SKPD/Unit Kerja menjadi teladan dalam berbagai tindakan / pola tindak bagi masyarakat dan menjadi penggerak dan pelopor dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

- b. Pemangku kepentingan internal / birokrasi sendiri

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan PNS sebagai bagian dan upaya mengurangi bahkan menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait KKN, serta adanya reward dan punishment yang jelas (reward bagi PNS yang berprestasi dan punishment bagi PNS yang melanggar).

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat

- Masyarakat mengharapkan perbaikan pelayanan perijinan. Secara spesifik, perbaikan atas pelayanan diharapkan prosedurnya lebih jelas dan juga integrasi beberapa unit organisasi yang berkaitan dengan pengurusan perijinan (masyarakat membutuhkan pelayanan perijinan disemua bidang dilaksanakan dalam satu atap/pintu).
- Masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- Masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah daerah lebih responsif dan komunikatif dengan masyarakat. Masyarakat masih mengeluhkan lambannya respon pemerintah daerah dalam memberikan jawaban terhadap berbagai pengaduan.
- Akses dan standar pelayanan pada daerah-daerah pelosok yang belum sama dengan daerah-daerah sekitar pusat pemerintahan.

- **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**
  - Terkait dengan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, keluhan stakeholders berkisar pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai-pegawai yang melayani secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat. Belum maksimalnya pelayanan aparat Kabupaten Banyuwangi disinyalir turut dikontribusikan dari aspek sumber daya manusia yang belum melayani dengan baik, sehingga masyarakat masih menuntut dilakukannya perbaikan pelayanan. Kebutuhan atau permasalahan lain yang diinginkan segera diperbaiki oleh pemerintah adalah pembenahan kapasitas Pemda dalam hal organisasi. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap belum bekerja dengan maksimal, bahkan keberadaannya belum memberikan kontribusi yang diharapkan.
  - Akuntabilitas. Terkait akuntabilitas, kebutuhan stakeholders lebih berfokus pada perbaikan penyediaan data dan informasi berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas.

**Meskipun** sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak **hal** yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya **menwujudkan** pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, antara lain:

- **Masih** adanya beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama terkait dengan beberapa perijinan dan kegiatan strategis. Kondisi ini seringkali menimbulkan potensi munculnya KKN.
- **Transparansi** kinerja pemerintah daerah juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dalam pengembangan strategi dan cara melakukan transparansi.

**Dalam** kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang **masih** dihadapi antara lain:

- **Masih** rendahnya integritas dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan pada stakeholders, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintah;
- **Jaminan** atas pelayanan kepada stakeholders masih kurang jelas karena minimnya Standard Operating Procedure (SOP) yang baik dan jelas.
- **Masih** banyaknya Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kualitas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.



- Sarana dan lingkungan kerja yang belum mendukung pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- Kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- Disiplin pegawai masih rendah;
- Belum dikembangkannya sistem manajemen kinerja individu;
- Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
- Belum maksimalnya upaya dan komitmen dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- Indikator Kinerja Utama belum mencerminkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan dan masalah yang seharusnya diselesaikan pemerintah daerah

Berdasarkan kondisi umum sebagaimana telah diuraikan di atas, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut:

#### **a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

##### **1) Penataan Perundang-undangan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Identifikasi dan inventarisasi atas berbagai Peraturan Perundang-undangan Daerah belum pernah dilakukan, sehingga antar SKPD belum memahami kebijakan satu sama lain yang saling berkaitan. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan ditingkat pelaksanaan, seperti munculnya ketidakharmonisan, tumpang tindih dan over-regulasi.
- b) Penegakan hukum juga seringkali masih menjadi pertanyaan / belum optimal.

## **2) Sumber Daya Manusia Aparatur**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Masih rendahnya kompetensi pegawai yang mengakibatkan kualitas pelayanan yang belum maksimal dan mampu memuaskan kebutuhan stakeholders.
- b) Penempatan pegawai belum mempertimbangkan kompetensi pegawai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Selain berakibat pada rendahnya kualitas kerja pegawai, juga pada masih rendahnya disiplin dan komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
- c) Informasi kepegawaian belum dilakukan dengan baik.
- d) Penilaian kinerja pegawai belum maksimal dilakukan.
- e) Penyelenggaraan berbagai diklat bagi PNS yang belum berbasis kebutuhan dan cenderung bersifat rutin.
- f) Distribusi PNS yang belum dilakukan secara baik.
- g) Disiplin dan etika pegawai yang belum menjadi bagian budaya organisasi.

## **3) Tatalaksana**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b) Beberapa Satuan Kerja Instansi pemerintah belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP).
- c) Gagasan penciptaan sistem elektronik government untuk meningkatkan kualitas pelayanan belum menjadi kebutuhan dan komitmen berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan.

## **4) Pengawasan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Pengembangan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara maksimal.
- b) Peran pengawas internal belum maksimal dalam upaya tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c) SDM aparatur pengawasan belum cukup dan mampu untuk dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.

**Empat** prioritas tersebut di atas akan menjadi agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuwangi.

### **Prioritas yang harus terus dipelihara.**

Hal-hal yang sudah mencapai hasil yang baik jika tidak dipertahankan kinerjanya cenderung mengalami penurunan bahkan cenderung tidak mendapatkan perhatian. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuwangi memasukkan unsur pemeliharaan untuk memastikan bahwa kualitas yang sudah baik ini tetap terjamin kesinambungannya. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a). Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN
  - Mempertahankan opini WTP dari BPK.
  - Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan SKPD / Unit Kerja untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
  - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  - Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
  
- b). Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat
  - Perluasan jangkauan fasilitas internet gratis bagi masyarakat.
  - Menjamin kualitas transaksi masyarakat dan juga kepuasan masyarakat, berbagai fasilitas ekonomi (pertokoan dan pasar) perlu ditingkatkan kualitasnya baik secara sarana prasarana maupun pelayanannya.
  - Penambahan dan pengembangan beberapa kawasan hijau.
  - Penyediaan sarana pengaduan pelayanan publik secara on line.
  - Pelayanan kesehatan prima khususnya pelayanan kesehatan gratis (Jamkesmas dan Jamkesda).
  - Pelayanan pendidikan gratis bagi anak yang berprestasi dari keluarga miskin dan kurang mampu.
  - Pengembangan Bandar Udara.
  - Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line.
  - Pelayanan one stop service pada semua SKPD / Unit Pelayanan Publik dan pada Kelurahan/Desa.
  - Pengembangan e-office.
  
- c). Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
  - Pengembangan e-government khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (e-planning, e-budgeting, e-audit) / SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan).

- Peningkatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Kualitas penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

**e. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama**, pelayanan administrasi kependudukan, mengingat bidang ini sangat penting dan strategis bagi pembangunan dan juga menjadi prioritas pemerintah pusat. Kondisi umum pelayanan administrasi kependudukan adalah bahwa masyarakat masih membutuhkan waktu yang masih relatif lama untuk mengurus administrasi kependudukan. Kondisi ini menimbulkan penumpukan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kondisi ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- SDM Aparatur yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan mentalitas, komitmen dan integritasnya dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang tidak berkualitas, berbelit-belit dan lama menjadi salah satu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- Disinyalir salah satu pemicu masih rendahnya kualitas SDM adalah masih rendahnya kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja yang tidak memiliki hubungan dengan *reward and punishment*.
- Manajemen administrasi kependudukan juga masih belum maksimal. Tantangan masih dihadapi dalam menciptakan kondisi tertib administrasi, serta fungsi pengendalian dan pengawasan yang sangat lemah sehingga berbagai praktek yang seharusnya dapat diperbaiki dengan segera tidak tertangani dengan baik dan berkontribusi pada ketidakpuasan masyarakat.

**Kedua**, Salah satu agenda penting dalam Reformasi Birokrasi adalah penetapan Quick Wins. Sasaran utama penetapan quick wins adalah memilih kegiatan yang dengan cepat memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Satu quick wins yang dipilih Kabupaten Banyuwangi untuk tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah : **Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara On Line dengan Moto “Lahir Procot, Pulang Bawa Akta.**

Sedangkan untuk Quick Wins tahun-tahun berikutnya akan digali / dipilih sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

**4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Sebagai wujud niat / komitmen untuk memberantas korupsi atau mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka untuk tahun pertama akan ditetapkan SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian dan Diklat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Blambangan. SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh SKPD lainnya sebagai SKPD yang betul-betul bebas korupsi dan menjadi SKPD yang bersih dan melayani. Dan untuk tahun-tahun berikutnya akan dikembangkan/diperluas dengan menetapkan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- 5. Prioritas SKPD**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini dipilih karena menjadi keinginan stakeholders untuk segera diperbaiki dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dalam sebuah proses identifikasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. Prioritas tersebut antara lain :

**1) Pemenuhan tenaga pendidik**

Pendidikan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kaitan ini pemenuhan tenaga pendidik harus menjadi prioritas. Adapun tenaga pendidik yang menjadi prioritas di Kabupaten Banyuwangi adalah Guru SD dan Guru Produktif di SMK.

## **2) Peningkatan mindset “melayani” bagi tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit dan Puskesmas**

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang representatif juga sangat ditentukan oleh petugas yang melaksanakan pelayanan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperlukan adanya mindset “melayani” bagi tenaga medis di Rumah Sakit dan Puskesmas.

## **3) Perbaikan / penyediaan sarana dan prasarana publik**

Jenis-jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

### **a) Listrik / Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)**

Pelayanan penyediaan listrik / Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Selain juga untuk menjaga kelancaran aktivitas dan keamanan lingkungan masyarakat.

### **b) Instalasi Air Bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyediaan instalasi air bersih.

### **c) Jalan Kabupaten**

Jalan kabupaten akan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.

### **d) Jembatan**

Kondisi demografis Kabupaten Banyuwangi yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

e) Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan yang sangat penting. Kondisi saat ini masyarakat masih banyak yang terbiasa untuk buang air besar di sembarang tempat, seperti di kebun, empang, sungai dan bahkan dilahan terbuka disekitar rumah tinggal sehingga menyebabkan lingkungan kurang sehat dan menimbulkan munculnya berbagai macam penyakit. Untuk itu, perlu disediakan tempat (sanitasi) agar perilaku masyarakat yang kurang sehat tersebut dapat dikurangi dan lama-lama dapat berperilaku sehat dengan buang air besar pada tempatnya. Hal ini juga mendukung program pemerintah yaitu Indonesia bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di era Milenium Development Goals.

f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

**4) Perbaikan / penyederhanaan pelayanan perijinan**

Pelayanan perijinan selalu menjadi sorotan masyarakat baik terkait proses, biaya, kepastian hukum, kemudahan, dan waktu penyelesaian. Perbaikan / penyederhanaan pelayanan perijinan diharapkan selain meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan juga diharapkan dapat menarik para investor untuk berinvestasi ke Banyuwangi. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas bidang ini antara lain :

- a). Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b). Izin Gangguan
- c). Izin bidang Kepariwisataaan
- d). Izin Jasa Usaha
- e). Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
- f). Izin bidang perhubungan.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.